

**HUBUNGAN RELEVANSI INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH JAWA TIMUR**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi**



Oleh :

RIANTO PRASETYO WIBOWO

NIM : 2010340408

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

2012

PENGESAHAN ARTIKEL SKRIPSI

Nama : RIANTO PRASETYO WIBOWO

Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 7 April 1989

N.I.M : 2010340408

Jurusan : Akuntansi

Program Pendidikan : Strata 1


Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Judul : Hubungan Relevansi Informasi Akuntansi terhadap
Financial Distress Pemerintah Daerah Jawa Timur

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 20-08-2012

Co. Dosen Pembimbing,
Tanggal: 29-08-2012



Dr. AGUS SAMEKTO, Ak., M.Si.



TRIANA MAYASARI, SE., M.Si., Ak.

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Tanggal: 21-08-2012



SUPRIYATI SE., M.Si., Ak.

HUBUNGAN RELEVANSI INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* PEMERINTAH DAERAH JAWA TIMUR

Rianto Prasetyo Wibowo

STIE Perbanas Surabaya

Email: pengusaha89@yahoo.com

Jln. Nginden II No.95 Surabaya

ABSTRACT

Financial distress is an inability of local government to give public services appropriate with minimum standards of service caused by lack of funds. This condition is a negative signal of local government because reflects bad government's performance. The aim of this research is examining the relationship of accounting information relevance to financial distress of local government in East Java. Accounting information relevance is measured by return on asset (ROA), position government wealth (POS_{GW}), performance government wealth (PER_{GW}), current liquidity government wealth (CL_{GW}), current liability (CL) and debt to revenue (DTR). Whereas, local government's financial distress is measured by debt service coverage ratio (DSCR) based on Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. The population and samples of this research is local government in East Java both counties and cities. Census method is used to collect the samples because every element in the population is used as samples. Pearson's correlation product is used to analyze the data. The statistical test result shows that POS_{GW} , CL_{GW} , CL a $dDTR$ have a strong enough relationship and unidirectional to DSCR. This result is in line with agency theory which is stated that local government will seek to minimize financial distress condition by optimizing their financial performance. Based on the explanation, it can be concluded that accounting information relevance has a relationship to local government's financial distress.

Key Words: accounting information relevance, financial distress, local government, East Java, financial ratio

PENDAHULUAN

Jawa Timur merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Pada tahun 2011, tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

berada pada level 7,2% (Choirul, 2011). Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa karena angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,4%. Berdasarkan kondisi

tersebut, bisa digeneralisasikan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur sudah bagus (sesuai dengan standar pelaporan akuntansi pemerintah). (kominfo.jatimprov.go.id diakses tanggal 27 Maret 2012)

Salah satu perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah ialah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut (realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan) akan digunakan oleh para stakeholders untuk mengevaluasi alokasi sumber daya Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (IAI, 2007). Sedangkan Sutaryo dkk. (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah bisa dinyatakan relevan jika memenuhi empat kriteria. Pertama, memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Kedua, memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Ketiga, disajikan tepat waktu (*timelines*). Keempat, disajikan secara lengkap (*completeness*).

Financial distress merupakan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana (kesulitan keuangan) yang berakibat ketidakmampuan pemerintah untuk memberi pelayanan pada publik sesuai standar minimal mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Jones dan Walker, 2007). Terkait kesulitan keuangan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah menetapkan persyaratan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman daerah guna mengatasi kesulitan keuangan tersebut yaitu dengan nilai *debt service coverage ratio* (DSCR) minimal 2,5. Ingram et al. (1987) menyimpulkan bahwa relevansi informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah memiliki hubungan dengan *financial distress* pemerintah yang diukur dengan *bond rating* dan *yield* atas obligasi pemerintah.

Penelitian ini berupaya untuk menguji hubungan relevansi informasi akuntansi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah Jawa Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan karena bisa memberikan gambaran kondisi pelayanan publik di setiap kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa Timur. Dengan demikian, Pemerintah Daerah bisa mengambil langkah strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun RPJPD

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah).

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan (antara agen dan prinsipal). Pihak yang bertindak sebagai agen dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Jawa Timur dan DPRD sebagai prinsipalnya. DPRD akan melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya asimetri informasi dan perilaku disfungsional dari *agent* atau Pemerintah Daerah (Indrawati, 2003) serta merupakan proses akuntabilitas publik (Indra, 2010:230).

Pemerintah Daerah yang mengalami *financial distress* akan senantiasa mencari cara untuk memperbaiki kondisi tersebut, baik melalui hutang maupun dengan memperbesar pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah bisa memperoleh hutang jika memiliki rasio kemampuan melunasi hutang (debt service coverage ratio) lebih besar dari 2,5. Namun, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka Pemerintah Daerah tidak

diperkenankan untuk mengajukan pinjaman (hutang). Oleh karena itu, langkah yang bisa ditempuh yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan PAD yaitu dengan memperbesar pos SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) dalam laporan keuangannya. Agus (2010) menyatakan bahwa SILPA akan dimasukkan ke dalam Perubahan Alokasi Keuangan (PAK) APBD tahun berikutnya. Hal ini akan mengakibatkan pos PAD semakin tinggi sebab SILPA akan diakui sebagai pendapatan asli daerah pada periode anggaran tahun berikutnya. Tingginya PAD akan memperbesar ketersediaan dana bagi Pemerintah Daerah sehingga bisa mengoptimalkan pelayanan kepada publik. Namun, SILPA yang tinggi bisa jadi merupakan indikasi inefisiensi Pemerintah Daerah. SILPA bisa berasal dari anggaran program kerja yang tidak direalisasikan. Sebagai pihak yang mengetahui informasi lebih banyak tentang kondisi keuangan daerahnya, Pemerintah Daerah cenderung untuk membuat anggaran semu supaya SILPA yang dihasilkan selama satu periode menjadi semakin besar. (www.kominfo.jatimprov.go.id, diakses tanggal 24 Juni 2012)

Relevansi Informasi Akuntansi

Laporan keuangan Pemerintah Daerah bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan

ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (IAI, 2007). Sedangkan Sutaryo dkk. (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah bisa dinyatakan relevan jika memenuhi empat kriteria. Pertama, memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Kedua, memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Ketiga, disajikan tepat waktu (*timelines*). Keempat, disajikan secara lengkap (*completeness*).

Indikator Pengukuran Relevansi Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah

Cohen (2006) melakukan penelitian dengan menggunakan rasio ROA, ROE, *Profit Margin*, CL, CLGW, LTDA, dan DTR. Plammer et al. (2007) menggunakan rasio PER_{GW}, PER_{FUND}, POS_{GW} dan POS_{FUND} dalam penelitiannya. Sedangkan Sutaryo dkk. (2010) melakukan penelitian nilai relevan informasi akuntansi dengan menggunakan rasio ROA, POS_{GW}, CL_{GW}, LQ, CL, LTDA, PER_{GW}, LCO dan DTR. Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: ROA, POS_{GW}, PER_{GW}, CL_{GW}, CL, LTDA dan DTR. Rasio-rasio tersebut dipilih karena memiliki hubungan yang paling kuat dibandingkan dengan rasio yang lainnya.

Financial Distress Pemerintah Daerah

Menurut Jones dan Walker (2007) *financial distress* bisa didefinisikan

sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik. Selain itu, terkait kesulitan keuangan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah menetapkan persyaratan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman daerah guna mengatasi kesulitan keuangan tersebut dengan syarat nilai *debt service coverage ratio* minimal 2,5.

Hubungan Relevansi Informasi Akuntansi dengan *Financial distress* Pemerintah Daerah

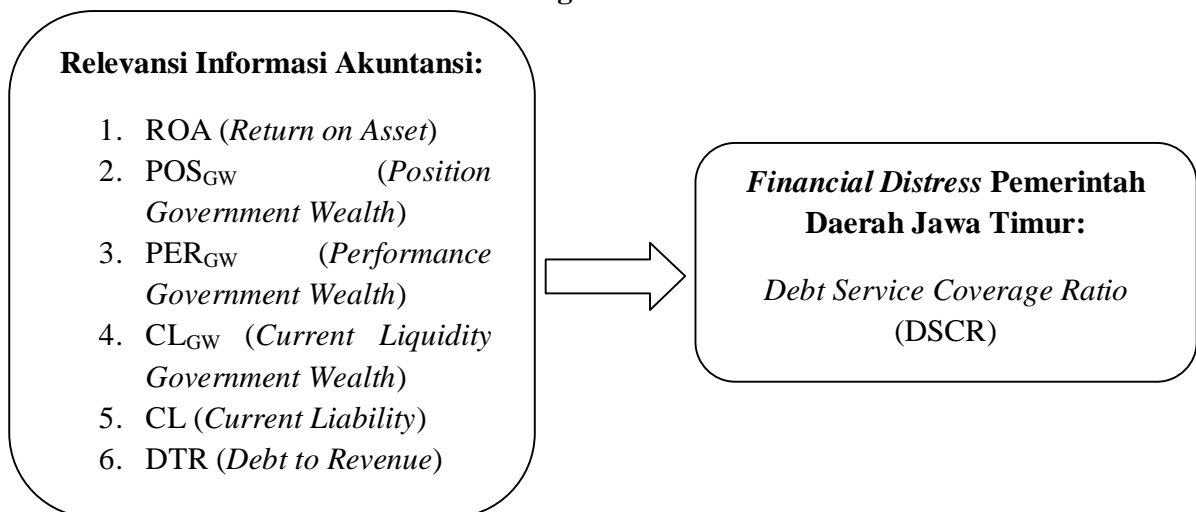
Penelitian tentang *financial distress* sudah banyak dilakukan. Plammer et al. (2007) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa *total net asset* dalam laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual basis menyediakan peningkatan informasi dalam neraca. Namun, untuk *revenues minus expenses* dan *current liabilities* tidak menyediakan peningkatan informasi dalam neraca. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kesimpulan bahwa ukuran *total net asset* dengan menggunakan dasar akrual basis dalam neraca dan modifikasi akrual basis untuk *revenues minus expenses* dapat menyediakan informasi dalam menjelaskan risiko kegagalan sebuah perusahaan (kegagalan distrik sekolah).

Sutaryo dkk. (2010) berhasil membuktikan bahwa *Return on Asset* (ROA) dan *Performance Government Wealth* (PER_{GW}) memiliki keterkaitan dengan probabilitas *financial distress* Pemerintah Daerah. Plammer et.al (2007) menjelaskan bahwa *current liquidity government wealth* (CL_{GW}) dan *position government wealth* (POS_{GW}) memiliki hubungan dengan kegagalan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Cohen (2006) berhasil membuktikan bahwa rasio *current liability* (CL) dan *debt to*

revenue (DTR) berpengaruh terhadap probabilitas *financial distress* Pemerintah Daerah. Adapun kondisi *financial distress* Pemerintah Daerah bisa dinilai dengan menggunakan *debt service coverage ratio* (DSCR) berdasarkan PP No. 54 tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo dkk. (2010), Plammer et al. (2007), dan Cohen (2006), maka Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disusun hipotesis statistik penelitian sebagai berikut:

H1 : Ada hubungan relevansi informasi akuntansi terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah Jawa Timur

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validasi teori pada kondisi tertentu. Pengujian hipotesis ini menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel yang merupakan hubungan kausalitas antara

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Variabel yang akan diuji hanya terkait dengan angka-angka rasio yang ada dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur selama periode 2005 sampai dengan 2007. Pengujian yang dilakukan menggunakan alat uji *Pearson's Correlation Product*.

Identifikasi Variabel

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, variabel yang digunakan sebagai pedoman pembahasan dalam penelitian ini adalah relevansi informasi akuntansi sebagai variabel independen (X) dan *financial distress* Pemerintah Daerah Jawa Timur sebagai variabel dependen (Y).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan variabel dependen *financial distress* Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Financial distress* Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan *debt service coverage ratio* (DSCR) sesuai dengan PP No. 54/ 2005 tentang Pinjaman Daerah. Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman Pemerintah Daerah (*debt service coverage ratio*) dihitung berdasarkan perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil yang tidak termasuk dana bagi hasil dana reboisasi, dan dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga,

dan biaya lain-lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik.

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah relevansi informasi akuntansi yang diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu: ROA, POS_{GW}, PER_{GW}, CL_{GW}, CL dan DTR.

Return on Asset (ROA) merupakan perbandingan antara *net surplus (deficit)* dengan *total assets*. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan. Berdasarkan pernyataan Sutaryo dkk. (2010) Pemda yang memiliki rasio ROA tinggi berarti terindikasi mengalami *financial distress*. Hal ini dikarenakan surplus yang terjadi harus dikembalikan ke kas negara. Namun, berdasarkan UU RI No. 32 Tahun 2004, surplus yang terjadi harus dilaporkan dalam pos SILPA (selisih lebih penggunaan anggaran) yang akan memperbesar PAD tahun berikutnya.

Position Government Wealth (POS_{GW}) merupakan gambaran dari perbandingan antara jumlah *net asset* dengan jumlah *total revenue*. Angka rasio POS_{GW} yang tinggi mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai infrastruktur yang cukup untuk memberi pelayanan pada publik dan infrastruktur tersebut didanai dari pendapatan asli daerah, sehingga semakin tinggi angka rasio ini, semakin kecil probabilitas

Pemerintah Daerah untuk mengalami *financial distress*.

Performance Government Wealth (PER_{GW}) merupakan perbandingan antara *total revenues minus total expenditures* dengan *total revenues*. PER_{GW} yang tinggi memberi indikasi bahwa pemerintah tersebut mempunyai surplus yang tinggi dan mempunyai probabilitas yang tinggi untuk mengalami *financial distress*. (Plammer et al., 2007)

Current Liquidity Government Wealth (CL_{GW}) merupakan perbandingan dari kewajiban lancar dengan total pendapatan. Semakin tinggi rasio CL_{GW} , maka semakin kecil kemungkinan Pemerintah Daerah mengalami *financial distress*. Rasio CL_{GW} yang tinggi menunjukkan jumlah hutang Pemerintah Daerah yang relatif besar sehingga Pemerintah Daerah memiliki ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

CL (Current Liability) merupakan hasil perbandingan antara kewajiban lancar dengan pendapatan operasional bersih. Semakin tinggi rasio CL, maka semakin kecil kemungkinan Pemerintah Daerah mengalami *financial distress*. Rasio CL yang tinggi menunjukkan jumlah hutang Pemerintah Daerah yang relatif besar sehingga Pemerintah Daerah memiliki ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

Debt to Revenue (DTR) merupakan rasio dari hasil

perbandingan total hutang dengan total pendapatan. Rasio DTR mampu memberikan informasi besarnya hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, khususnya hutang jangka panjang. Semakin tinggi hutang, maka kemungkinan Pemerintah Daerah untuk mengalami *financial distress* menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai rasio DTR maka semakin kecil probabilitas Pemerintah Daerah mengalami *financial distress*.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa Timur. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa timur dan laporan keuangannya dipublikasikan melalui *website* www.bpk.go.id periode 2005 sampai dengan 2007. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus karena seluruh elemen dalam populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Sensus merupakan metode yang paling tepat dalam penelitian ini karena peneliti bermaksud untuk menjelaskan karakteristik setiap elemen dalam populasi yang ditentukan. (Nur & Bambang, 2002: 117)

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik SPSS

19. Adapun uji ini digunakan untuk mengetahui ketersebaran data penelitian. Semakin homogen data yang akan diuji, maka data tersebut semakin bagus karena tidak ada penyimpangan (kesenjangan) yang berarti. Syarat data penelitian bisa dikatakan normal (tersebar secara normal) adalah jika probabilitas signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 (Imam, 2006:28). Alat uji yang dipilih yaitu *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Pengujian Hipotesis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji korelasi yang dibantu program SPSS versi 19 untuk menguji hubungan relevansi informasi akuntansi terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah Jawa Timur. Jenis alat uji yang dipilih untuk melakukan uji korelasi yaitu *Pearson's Correlation Product*. Alat uji ini mensyaratkan data penelitian harus terdistribusi secara normal. (Sugiyono, 2007)

Menurut Imam (2006: 82) analisis korelasi (*correlation test*) bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antar dua variabel. Selain itu, analisis ini juga bisa digunakan untuk melihat arah hubungan antar variabel. Penelitian ini dirancang untuk menguji hubungan (asosiasi/ korelasi) antara variabel relevansi informasi akuntansi dengan *financial distress* Pemerintah Daerah Jawa Timur. Oleh karena masing-masing variabel memiliki indikator pengukuran sendiri-sendiri, maka

analisis korelasi akan dilakukan terhadap masing-masing indikator pengukur relevansi informasi akuntansi (ROA, POS_{GW}, PER_{GW}, CL_{GW}, CL dan DTR) dan indikator pengukur *financial distress* Pemerintah Daerah (DSCR).

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diketahui bahwa sampel dalam penelitian ini berjumlah tiga puluh delapan daerah. Ke-38 daerah tersebut terdiri dari 29 kabupaten (76%) dan 9 kota (24%). Jumlah laporan keuangan yang dianalisis sebanyak 114 yang terdiri dari 38 laporan keuangan tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007.

Hasil perhitungan *debt service coverage ratio* (DSCR), baik untuk data satu tahunan maupun data rata-rata tiga tahun menunjukkan nilai kurang dari 2,5 ($< 2,5$). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005, daerah yang terindikasi mengalami *financial distress* adalah yang memiliki nilai DSCR $< 2,5$. Informasi tersebut menunjukkan bahwa semua kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa Timur pada tahun 2005 s.d tahun 2007 mengalami kondisi *financial distress*.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan program SPSS versi 19, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

No.	Rasio	Nilai K-S	Signifikansi	Keterangan
1	DSCR	0,659	0,778	Normal
2	ROA	0,584	0,885	Normal
3	POSGW	0,64	0,807	Normal
4	PERGW	0,659	0,778	Normal
5	CLGW	0,951	0,327	Normal
6	CLGW	0,8	0,544	Normal
7	DTR	0,847	0,47	Normal

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 1, diperoleh informasi bahwa data DSCR memiliki nilai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) sebesar 0,659 dan signifikansinya di atas 0,05 (0,778) yang berarti data DSCR tersebar secara normal. Rasio *return on asset* (ROA) memiliki nilai K-S sebesar 0,584 dan probabilitas signifikansinya 0,885 ($> 0,05$). Rasio POS_{GW} menghasilkan nilai K-S sebesar 0,640 dan signifikansinya $> 0,05$ (0,807). Rasio PER_{GW} menunjukkan nilai K-S sebesar 0,659 dengan tingkat signifikansi 0,778 ($> 0,05$). Rasio CL_{GW} memiliki nilai K-S sebesar 0,951 dengan signifikansi 0,327 ($> 0,05$).

Rasio CL memiliki nilai K-S sebesar 0,800 dan probabilitas signifikansinya sebesar 0,544 ($> 0,05$). Rasio DTR memiliki nilai K-S sebesar 0,847 dan signifikansinya sebesar 0,470 ($> 0,05$). Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tersebar secara normal (homogen) karena tingkat signifikansinya di atas 0,05.

Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan uji korelasi. Hasil uji korelasi dengan menggunakan *Pearson's Correlation Product* disajikan sebagai berikut.

Tabel 2
Hasil Uji Korelasi

No.	Rasio	Pearson	Signifikansi	Keterangan	Tipe Korelasi
1	ROA	0,11	0,51	Tidak Signifikan	Lemah (Positif)
2	POSGW	0,464	0,003	Signifikan	Cukup Kuat (Positif)
3	PERGW	-0,097	0,654	Tidak Signifikan	Lemah (Negatif)
4	CLGW	0,459	0,004	Signifikan	Cukup Kuat (Positif)
5	CL	0,458	0,004	Signifikan	Cukup Kuat (Positif)
6	DTR	0,459	0,004	Signifikan	Cukup Kuat (Positif)

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 1, diperoleh informasi bahwa rasio *return on asset* (ROA) menghasilkan nilai korelasi *Pearson* (*Pearson*) sebesar 0,110 dengan tingkat signifikansi 0,510 ($> 0,10$) yang artinya rasio ROA memiliki hubungan yang lemah dan searah terhadap DSCR, tetapi tidak signifikan pada tingkat kesalahan 10%. Rasio POS_{GW} memiliki nilai *Pearson* 0,464 dan signifikansinya 0,003 ($< 0,10$) yang berarti rasio POS_{GW} memiliki hubungan yang cukup kuat dengan DSCR dan hubungannya searah. Hasil pengujian statistik atas rasio PER_{GW} menunjukkan nilai *Pearson* sebesar -0,097 dengan probabilitas signifikan 0,564 ($> 0,10$) yang maknanya rasio PER_{GW} memiliki hubungan yang lemah terhadap rasio DSCR dan arahnya terbalik, tetapi hubungan tersebut tidak signifikan pada 10%. Rasio CL_{GW} memiliki nilai *Pearson* 0,459 dengan tingkat signifikansi 0,004 ($< 0,10$) yang berarti rasio ini memiliki hubungan yang cukup kuat dan searah dengan DSCR. Pengujian terhadap rasio CL menghasilkan nilai *Pearson* sebesar 0,458 dan signifikansinya lebih kecil dari tingkat kesalahan (0,004) yang bermakna rasio ini berhubungan cukup kuat dengan DSCR dan tipe hubungannya searah. Rasio DTR memiliki nilai *Pearson* 0,459 dan signifikan pada 0,10 (0,004) yang maknanya, rasio ini memiliki hubungan yang kuat dan searah dengan rasio DSCR. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa rasio pengukur relevansi informasi akuntansi yang memiliki hubungan terhadap rasio DSCR (pengukur *financial distress*) untuk data rata-rata

3 tahun antara lain: POS_{GW} , CL_{GW} , CL, dan DTR.

Bagian ini membahas temuan teoritis dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Pembahasan dilakukan berdasarkan pada temuan empiris, penelitian terdahulu yang relevan dan aturan-aturan yang memiliki kekuatan hukum (PP No. 54/ 2005 dan UU RI No. 32/ 2004). Pembahasan akan dilakukan dengan menguraikan hasil pengujian dari masing-masing rasio pengukur relevansi informasi akuntansi supaya lebih sistematis.

Financial distress merupakan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan standar minimal pelayanan yang disebabkan kurangnya ketersediaan dana untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Kondisi *financial distress* merupakan sinyal negatif bagi Pemerintah Daerah karena mencerminkan kinerja yang kurang bagus selama satu periode. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk meminimalisasi kondisi *financial distress* daerahnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah bisa terindikasi mengalami *financial distress* jika rasio kemampuan membayar kembali hutang-hutangnya (debt service coverage ratio) lebih kecil dari 2,5. Rasio DSCR bisa dioptimalkan melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan suntikan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan (Dana Alokasi Umum).

Ditinjau dari teori agensi, Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai agen akan senantiasa mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan rasio kinerja keuangannya. Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan mengoptimalkan surplus anggaran untuk memperbesar nilai PAD periode berikutnya (Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Nilai PAD yang tinggi akan meningkatkan rasio DSCR. Selain itu, surplus yang terjadi selama periode berjalan akan memperbesar rasio *return on asset* (ROA) dan *performance government wealth* (PER_{GW}) karena surplus dari realisasi anggaran akan digunakan sebagai pembilang dalam menghitung kedua rasio tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, maka semakin tinggi rasio ROA dan PER_{GW} akan mencerminkan ketersediaan dana untuk membiayai aktivitas pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio ROA dan PER_{GW} , maka kemungkinan Pemerintah Daerah mengalami *financial distress* menjadi semakin rendah.

Hasil pengujian statistik terhadap rasio *return on asset* (ROA) dan *performance government wealth* (PER_{GW}) menunjukkan bahwa kedua rasio tersebut memiliki hubungan yang lemah terhadap *debt service coverage ratio* (DSCR) dan arah hubungan rasio PER_{GW} adalah terbalik. Lemahnya hubungan tersebut menyebabkan rasio ROA dan PER_{GW} tidak signifikan pada tingkat kesalahan 10% (0,10). Hasil

pengujian tersebut mencerminkan bahwa semakin tinggi rasio ROA dan PER_{GW} , maka semakin kecil nilai rasio DSCR sehingga kemungkinan Pemerintah Daerah mengalami *financial distress* menjadi semakin tinggi. Kondisi ini bertentangan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio ROA dan PER_{GW} , maka kemungkinan Pemerintah Daerah mengalami *financial distress* menjadi semakin rendah karena Pemda memiliki ketersediaan dana yang cukup besar yang berasal dari surplus anggaran.

Peneliti juga melakukan uji korelasi dengan memisahkan antara daerah yang memiliki rasio positif dan negatif, tetapi hasilnya menunjukkan konsistensi bahwa rasio ROA dan PER_{GW} tidak mampu menunjukkan hubungan relevansi informasi akuntansi terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah Jawa Timur. Hasil pengujian atas rasio ROA tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo dkk. (2010) yang menyatakan bahwa ROA memiliki hubungan terkait *financial distress* Pemerintah Daerah. Namun, hasil pengujian atas rasio PER_{GW} sejalan dengan pernyataan Plammer et al. (2007) dan Sutaryo dkk. (2010) bahwa rasio PER_{GW} tidak memiliki keterkaitan terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah.

Ketidaksesuaian hasil pengujian terhadap rasio ROA dan PER_{GW} dengan teori agensi karena surplus yang dialami oleh Pemerintah Daerah tidak berasal dari efisiensi,

namun justru berasal dari alokasi anggaran kegiatan yang tidak direalisasikan. Selain itu, ketidakmampuan rasio ROA dan PER_{GW} menjelaskan hubungan relevansi informasi akuntansi terhadap *financial distress* Pemda Jatim juga disebabkan karena sisa anggaran (surplus/ defisit) dimasukkan ke dalam pos SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) atau SIKPA (Sisa Kurang Penggunaan Anggaran) (UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Hal ini berbeda dengan pernyataan Sutaryo dkk. (2010) dan Plammer et al. (2007) bahwa surplus yang terjadi harus dikembalikan ke kas negara. Sebaliknya, Pemerintah Daerah di Indonesia justru diberi kewenangan untuk mengelola selisih anggaran sebagai salah satu unsur penambah PAD dengan memasukkannya ke dalam Perubahan Alokasi Keuangan (PAK) APBD (www.kominfo.jatimprov.go.id, diakses tanggal 24 Juni 2012). Harapannya, selisih lebih anggaran yang terjadi bisa dioptimalkan untuk membangun infrastruktur yang mendukung pemberian pelayanan kepada publik.

Surplus dari realisasi anggaran Pemerintah Daerah yang bersumber dari alokasi dana program kerja yang tidak direalisasikan, bukan semata-mata karena Pemda sengaja tidak merealisasikan program kerja tersebut. Namun, disebabkan oleh dasar hukum (payung hukum) yang kurang kuat. Nova (2011) menyatakan bahwa pihak pelaksana (Pemerintah Daerah)

cenderung takut untuk membuat penyesuaian-penyesuaian dalam realisasi anggaran tahun berjalan karena mereka khawatir hal tersebut dapat dijadikan sebagai temuan oleh inspektorat atau BPK sebab tidak sesuai dengan perencanaan yang diajukan.

Keterlambatan pengesahan anggaran juga merupakan penyebab adanya program kerja yang tidak direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Ahmad (2012) menilai bahwa keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh DPRD akan berdampak pada pembangunan di daerah yang imbasnya pelayanan publik akan terbengkalai. Misalnya, APBD baru disahkan oleh DPRD pada bulan kedua sementara pada bulan pertama ada program kerja yang harus dilaksanakan. Ketiadaan dana untuk merealisasikan program kerja bulan pertama mengakibatkan program kerja tersebut tidak dilaksanakan sehingga ketika anggaran sudah disahkan maka anggaran untuk program kerja bulan pertama menjadi *idle* yang menyebabkan terjadinya surplus anggaran pada akhir periode. Agung dalam Ahmad (2012) berpendapat bahwa lambannya pengesahan APBD disinyalir karena adanya tarik-menarik kepentingan politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Kondisi ini dicerminkan dengan panjangnya tahapan birokrasi yang harus dilalui. APBD harus melalui persetujuan DPRD, sedangkan kondisi daerah satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Selain itu, APBD bukan hanya

masalah teknis, tetapi sudah masuk ke dalam dimensi politik. Hal inilah yang menyebabkan adanya program kerja yang tidak bisa direalisasikan sesuai dengan perencanaan karena tidak adanya ketersediaan dana yang cukup. (www.djkd.depdagri.go.id, diakses tanggal 19 Juni 2012)

Rasio *position government wealth* (POS_{GW}) mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggunakan pendapatannya dalam membiayai pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Ditinjau dari teori agensi, Pemerintah Daerah akan senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya untuk meminimalisasi kondisi *financial distress* yang mungkin dialami oleh daerahnya. Teori agensi juga menjelaskan bahwa rasio POS_{GW} berbanding lurus dengan rasio DSCR. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio POS_{GW} , maka rasio DSCR juga semakin tinggi yang mengakibatkan kemungkinan Pemerintah Daerah mengalami *financial distress* menjadi semakin rendah.

Hasil pengujian untuk rasio *position government wealth* (POS_{GW}) menunjukkan bahwa rasio ini memiliki hubungan yang cukup kuat dan searah dengan rasio DSCR. Hasil pengujian statistik terhadap rasio POS_{GW} sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio POS_{GW} , maka rasio DSCR juga akan semakin tinggi sehingga kemungkinan Pemerintah Daerah mengalami

financial distress menjadi semakin rendah.

Rasio CL_{GW} menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan untuk membayar kewajiban lancar yang dimiliki. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki, maka kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar hutang lancar yang dimilikinya juga semakin tinggi. Berdasarkan teori agensi, diketahui bahwa Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya yang nantinya akan digunakan untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa rasio CL_{GW} memiliki hubungan yang searah dengan rasio DSCR. Oleh karena itu bisa dijelaskan bahwa semakin tinggi rasio CL_{GW} , maka rasio DSCR akan semakin tinggi sehingga *financial distress* Pemda semakin rendah.

Hasil pengujian statistik terhadap rasio *current liquidity government wealth* (CL_{GW}) menunjukkan bahwa rasio ini memiliki hubungan yang cukup kuat dan searah dengan rasio DSCR untuk pengujian data tahun 2005, 2006 dan rata-rata data 3 tahun. Sedangkan uji statistik data tahun 2007 menunjukkan bahwa CL_{GW} memiliki hubungan yang kuat dan searah dengan rasio DSCR. Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo dkk. (2010) dan Plammer et.al (2007). Selain itu, hasil pengujian terhadap rasio CL_{GW} juga sejalan

dengan teori agensi yaitu semakin besar rasio CL_{GW} , maka rasio DSCR juga semakin tinggi sehingga *financial distress* Pemerintah Daerah menjadi semakin rendah.

Rasio *current liability* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk melunasi hutang jangka pendek yang dimiliki. Ditinjau dari teori agensi, Pemerintah Daerah cenderung untuk melakukan berbagai cara agar pendapatan asli daerahnya senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, berdasarkan sudut pandang teori agensi, maka rasio CL memiliki hubungan yang searah dengan rasio DSCR. Dengan kata lain semakin tinggi rasio CL, maka rasio DSCR juga akan semakin tinggi sehingga kemungkinan Pemerintah Daerah mengalami *financial distress* menjadi lebih rendah.

Berdasarkan hasil pengujian statistik data satu tahunan dan rata-rata data tiga tahun diperoleh informasi bahwa rasio *current liability* (CL) memiliki hubungan dengan rasio DSCR. Hal ini bisa dilihat dari tingkat signifikansi uji korelasi *Pearson* yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kesalahan (0,10). Pengujian data tahun 2007 menunjukkan bahwa rasio CL memiliki hubungan yang kuat dan searah dengan rasio DSCR. Sedangkan pengujian data tahun 2005, 2006 dan data rata-rata 3 tahun menunjukkan bahwa rasio CL memiliki hubungan yang cukup kuat dan searah dengan rasio DSCR. Hasil

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Plammer et.al (2007) dan Sutaryo dkk. (2010) yang juga berhasil membuktikan bahwa rasio CL memiliki keterkaitan dengan *financial distress* Pemerintah Daerah. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio CL, maka rasio DSCR juga semakin tinggi sehingga kemungkinan Pemerintah Daerah mengalami *financial distress* menjadi semakin rendah.

Mengacu pada *agency theory*, diketahui bahwa setiap Pemerintah Daerah akan berusaha untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada untuk membiayai kegiatan operasionalnya termasuk untuk melunasi hutang-hutang yang dimilikinya. Rasio DTR mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan total pendapatannya untuk membayar hutang yang dimiliki, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini memiliki hubungan yang searah dengan rasio DSCR. Oleh karena itu, bisa dijelaskan bahwa semakin besar rasio DTR, maka rasio DSCR juga semakin tinggi sehingga *financial distress* Pemerintah Daerah menjadi semakin rendah.

Berdasarkan hasil uji korelasi, diperoleh informasi bahwa rasio *debt to revenue* memiliki hubungan dengan rasio DSCR. Pengujian data tahun 2005, 2006 dan data rata-rata 3 tahun menunjukkan bahwa rasio DTR memiliki hubungan yang cukup kuat

dan searah dengan rasio DSCR. Namun, pengujian data tahun 2007 menunjukkan bahwa hubungan kedua rasio tersebut tergolong kuat dan searah. Hasil pengujian ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio DTR, maka rasio DSCR juga akan semakin tinggi sehingga *financial distress* Pemerintah Daerah menjadi semakin rendah. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cohen (2006) yang menyatakan bahwa DTR tidak memiliki hubungan terhadap *financial distress*.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, diketahui bahwa empat dari enam rasio yang digunakan untuk mengukur hubungan relevansi informasi akuntansi terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah Jawa Timur terbukti signifikan pada 0,10. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa relevansi informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur memiliki hubungan terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah Jawa Timur.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan relevansi informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah Jawa

Timur. Variabel relevansi informasi akuntansi diukur dengan menggunakan rasio ROA, POS_{GW} , PER_{GW} , CL_{GW} , CL dan DTR. Sedangkan variabel *financial distress* Pemerintah Daerah Jawa Timur diukur dengan menggunakan rasio DSCR yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa Timur. Laporan keuangan kabupaten dan kota yang dianalisis sejumlah 114 yang berasal dari 29 kabupaten dan 9 kota selama tiga tahun (periode 2005-2007). Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode sensus karena semua elemen dalam populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis korelasi (*Pearson's Correlation Product*).

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa empat dari enam rasio yang digunakan untuk mengukur relevansi informasi akuntansi, yaitu POS_{GW} , CL_{GW} , CL dan DTR memiliki hubungan yang cukup kuat dan searah terhadap rasio DSCR (indikator pengukur *financial distress* Pemda). Hasil tersebut sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah akan berusaha meminimalisasi kondisi *financial distress* daerahnya dengan mengoptimalkan kinerja keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa relevansi

informasi akuntansi memiliki hubungan terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah Jawa Timur.

Keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti selama proses penelitian ini dilakukan yaitu sumber pustaka yang terkait dengan hubungan relevansi informasi akuntansi terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah jumlahnya sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh belum banyaknya peneliti Indonesia yang melakukan penelitian tentang topik tersebut.

Beberapa saran yang bisa disampaikan untuk para peneliti berikutnya antara lain: 1) sebaiknya peneliti berikutnya menggunakan uji pengaruh supaya hasil penelitiannya menjadi lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan strategis bagi pihak-pihak yang berkepentingan; 2) peneliti berikutnya hendaknya memasukkan faktor non keuangan untuk memperoleh hasil analisis yang lebih kompleks sebab biasanya faktor non keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan 3) bagi peneliti berikutnya, lebih baik memperluas subyek penelitiannya karena penelitian ini hanya terbatas untuk Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Timur.

Saran yang bisa diberikan kepada pihak pemberi pinjaman (debitur) baik pihak ketiga maupun pemerintah pusat antara lain: 1) pemerintah pusat melalui DPRD hendaknya melakukan penilaian kinerja keuangan kepada masing-

masing daerah sebelum memberikan pinjaman maupun memberikan suntikan dana dalam bentuk dana perimbangan (Dana Alokasi Umum) dan 2) pihak ketiga (baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya) hendaknya bisa menerapkan metode penilaian kondisi kesehatan Pemerintah Daerah sebelum memutuskan untuk mengucurkan pinjaman sehingga pinjaman yang diberikan bisa tepat sasaran bukan malah menjadi bumerang bagi pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim dan Damayanti. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai*. Yogyakarta: BPFE.
- Agus Maimun. 2010. *Silpa Capai Rp 1,9 Triliun, DPRD Akan Panggil Biro Keuangan*. www.kominfo.jatimprov.go.id (Diakses tanggal 24 Juni 2012)
- Ahmad Erani Yustika. 2012. *Kucuran Dana Terlambat, Pelayanan Publik Terbengkalai*. www.djkd.depdagri.go.id (Dikases tanggal 19 Juni 2012)
- Botosan.C. (1997). Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. *The Accounting Review* Vol. 72 (July).pp. 323-349.
- Choirul Anam. 2011. *Pertumbuhan Ekonomi Jatim pada 2012 bisa Capai 8%*.

- <http://www.bisnis.com/articles/pertumbuhan-ekonomi-jatim-pada-2012-bisa-capai-8-percent>
(diakses tanggal 27 Maret 2012)
- Cohen, Sandra. 2006. Identifying the Moderator Factor of Financial Performance in Greek Municipal. *Annual Conference*. 5th. HFAA. Thessaonica.
- Groves. S. Godsey, dan Shulman. 2001. Financial Indicator for Local Government. *Public Financial International City Management Association*. 9: 243-255.
- IAI. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*.
- Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Edisi 4*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Indrawati Yuhertiana. 2003. Principal-Agent Theory dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik. *KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi* FE UTY Yogyakarta. No: 9. April. 403-422.
- Ingram, R. W., K. K. Raman dan E. R., Wilson. 1987. *Governmental Capital Market Research in Accounting: A Review*. Research in Governmental and Non Profit Accounting. 3: 98-97.
- Jensen, Michael C & Meckling, William H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jones, Stewart dan R., G., Walker. 2007. *Explanators of Local Government Distress*. ABACUS. 43(3): 396-418.
- Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
http://www.bapepam.go.id/dana_pensiun/regulasi_dp/peraturan_dp/03%20SKLK1%202345.pdf (diakses tanggal 30 April 2012)
- Nova Swandana A.A, “Standar Biaya Sebagai Alat Efisiensi Anggaran.” *Warta Anggaran Majalah Keuangan Sektor Publik* – Edisi 22 Tahun 2011. Hal. 34-35
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta. BPFE.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah
- Plammer, E., Hutchison, P., dan Patton, T. 2007. *GSAB No. 34's Government Financial Reporting Model: Evident on Its Information Relevan*. *The Accounting Review*. 82(1): 205-240.
- Platt, H., dan M.B. Platt. 2002. Predicting *Financial distress*. *Journal of Financial Service Professionals*. 56: 12-15.
- Reck, J. L., E., R, Wilson, D. Gotlob, dan M. Lawrence. 2004. *Government Capital Markets Research in Accounting: A Review*. Extension and Directions Future. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*. 11: 1-33.
- Sengupta, P. (1998). Corporate Disclosure Quality and the Cost of Debt, *The Accounting Review* Vol. 73, pp. 459-474.
- Steven, J., dan McGowen, R. 1983. "Financial Indicators and Trends for Local Government: A State-Based Policy Perspective". *Policy Study Review*. 2 (3): 33-51.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutaryo, dkk. 2010. "Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait *Financial distress* Pemerintah Daerah". Makalh disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIII di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Purwokerto
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah.
2011. Musprov VII APINDO, Gubernur Yakinkan Pengusaha untuk Berinvestasi. kominfo.jatimprov.go.id/watch/25892 (diakses tanggal 27 Maret 2012)
- www.bpk.go.id
- www.bpm.jatimprov.go.id

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap	: Rianto Prasetyo Wibowo
Tempat & Tanggal Lahir	: Mojokerto, 7 April 1989
Alamat	: Jln. Nginden II No. 95 Surabaya
Hobi	: Berorganisasi, Membaca, Menulis & Karya Seni
Skill	: <i>Leadership Skill & Communication Skill</i>
Email	: pengusaha89@yahoo.com
Nomor HP	: 085645489286/ 087853682126

PENGHARGAAN YANG PERNAH DIRAIH

No.	Keterangan	Tahun	Penyelenggara
1	Juara 1 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi	2011	Kopertis Wilayah VII Jatim
2	Juara 1 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi	2011	STIE Perbanas Surabaya
3	Juara 1 Lomba Akuntansi Internal	2011	HMJA STIE Perbanas
4	Peraih Medali Perunggu Lomba Poster PIMNAS ke-24	2011	Dinas Pendidikan Tinggi (DIKTI)
5	Juara Harapan 1 Pemilihan Duta Wisata Kab. Mojokerto	2011	Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Mojokerto
6	Lulusan Terbaik Program D3 Akuntansi	2010	STIE Perbanas Surabaya
7	Juara 1 Young Entrepreneur Award	2009	Harian Bisnis Indonesia & Commonwealth Bank
8	Juara 1 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi	2009	STIE Perbanas Surabaya
9	Juara 3 Lomba Kidung Perjuangan	2009	Surabaya Plaza Hotel
10	Juara 1 Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa	2008	STIE Perbanas Surabaya
11	Juara 1 Business Plan Competition	2008	Entrepreneur Club STIE Perbanas Surabaya
12	147 Pelari Tercepat 10 KM	2009	Pemprov. Jatim

13	Penerima Hibah PKMK (Jas Hujan Sepatu)	2008	DIKTI
14	Penerima Hibah PMW (Smart Magic Card)	2009	DIKTI
15	Penerima Hibah PKMK (Budidaya Jangkrik)	2010	DIKTI
16	Penerima Hibah PKMM (Smart Magic Card)	2011	DIKTI
17	Penerima Hibah PKMM (Sosialisasi Cara Pengoperasian LPG 3 Kg)	2011	DIKTI
18	10 Besar Lomba Karya Inovatif Mahasiswa	2011	Dinas Pendidikan Jawa timur
19	Finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PKMM)	2011	DIKTI
20	Juara Harapan 1 English Speech Contest	2009	English Club STIE Perbanas
21	Tenant Berprestasi Program IbK	2010	DIKTI (Dikoordinasi PPPPM STIE Perbanas)
22	Pemenang PKM-GT	2009	DIKTI

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Kedudukan	Periode
1	Entrepreneur Club STIE Perbanas	Manajer (Ketua Umum)	2008 – 2009
2	Himpunan Mahasiswa Diploma	Koordinator Litbang	2008 – 2010
3	Paduan Suara STIE Perbanas	Anggota	2007 – 2008
4	English Club	Anggota	2007 – 2008
5	Perbanas Entrepreneur Centre	Dewan Kehormatan	2009 – 2012
6	Himpunan Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA & BBM	Ketua	2010 - 2012